

Skripsi

by Gede Ramaditya

Submission date: 18-Dec-2024 06:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2555265227

File name: BAB_I_IV_V_Gede_Ramaditya_1151900249.docx (1.95M)

Word count: 5027

Character count: 32969

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Film dokumenter, "Dirty Vote" memicu diskusi yang mendalam tentang pentingnya transparansi dalam sistem politik. Dengan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan genre ini, film ini menjadi cermin bagi masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan yang dipegang oleh mereka yang diberi mandat untuk mewakili kepentingan rakyat. Ini dianggap sebagai alat komunikasi massa yang kompeten untuk tujuan Pendidikan dan rekreasi. Bergantung pada tujuan film, pesan komunikasi masa dapat bervariasi. Penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas ditujukan untuk memenangkan pemilu sebenarnya melemahkan tatanan demokrasi. Termasuk perhatian terhadap kekuatan besar di belakang pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang disebut-sebut paling banyak melakukan kecurangan. Mereka memuji keberanian para sineas dalam mengecam tindakan korupsi dan manipulasi yang mengancam integritas demokrasi.

Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara dan menghadirkan tiga pakar hukum tata negara, film ini mengekspos kemunafikan dari demokrasi borjuis yang ada dalam film dokumenter "Dirty Vote". Meskipun demikian, film biasanya dapat menyampaikan berbagai pesan, termasuk pendidikan, hiburan, dan informasi. Isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan lainnya adalah lambang-lambang yang ada di pikiran manusia untuk menyampaikan pesan dalam film. Namun, di sisi lain, banyak yang menentang "Dirty Vote" karena mereka merasa film ini cenderung bersifat sensationalist dan merusak kepercayaan masyarakat pada institusi politik. Mereka khawatir bahwa film ini dapat menciptakan sikap skeptisisme yang berlebihan terhadap proses demokrasi, bahkan mungkin menyebabkan ketidak partisipasian politik. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa film tersebut mungkin memiliki agenda politik tertentu dan tidak memberikan gambaran yang seimbang tentang situasi politik yang sesungguhnya.

Dengan adanya perdebatan antara pro dan kontra, "Dirty Vote" menciptakan diskusi yang penting tentang moralitas dan transparansi dalam politik modern. Meskipun kontroversial, film ini memicu pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana kita melihat kecurangan pemilu dan mengkritik kekuasaan politik, serta peran media dalam membentuk persepsi publik tentang demokrasi. Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, interaksi dan komunikasi tentu saja terjal dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi manusia difasilitasi melalui komunikasi, memungkinkan tercapainya tujuan dan sasaran yang dikomunikasikan. Masyarakat dalam situasi ini mempunyai kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat (Bagas Asmoro & Dwi Anggoro, n.d.).

Semakin beragamnya genre atau klasifikasi film menunjukkan bahwa film Indonesia mengalami kemajuan besar. Film fiksi atau dokumenter adalah rekaman peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Permasalahan sosial merupakan contoh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan film fiksi, film fiksi (cerita) merekam peristiwa nyata. Film dokumenter selalu berubah seiring berjalannya film. Sejak era film bisu, film dokumenter telah berkembang dari film yang sederhana dan lugas menjadi film yang lebih kompleks dengan beragam fungsi dan genre. Proses pembuatan film dokumenter sangat dipengaruhi oleh teknologi suara dan kamera. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi untuk menonton film.

Perkembangan teknologi memberi fasilitasi antara media dan masyarakat dalam jangkauan informasi yang luas. Framing berfungsi untuk membingkai berita atau informasi secara aktual sehingga berita yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan dan tujuan media itu sendiri. Keberadaan dan daya tarik film dikembangkan oleh sejumlah lembaga dan organisasi media untuk menyampaikan gagasan dan menanamkan nilai-nilai di masyarakat. Dalam upaya untuk mengubah psikologi sosial melalui sinema telah dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah.

Dalam proses produksi film dokumenter, prinsip 5W+1H (*What, Why, When, Where, and How*) harus menjadi landasan utama dari film dokumenter. Film ini sepertinya memberikan dampak yang kuat ketika dirilis, yakni di masa tenang yang membuat Banyak orang menjauh dari kebisingan kampung halaman mereka yang memekakkan telinga dan karena alasan yang tidak jelas berhenti dan berpikir lebih dalam. Ada seribu satu skandal dalam pemilu tahun ini, tapi semuanya punya satu kesamaan. Yang tak kalah penting, ada baiknya Dirty Vote fokus pada paslon 02. Pasalnya, para pendukung tim kemenangan dan paslon 01 dan 03 jelas aktif memanfaatkan film ini sebagai alat efektif melawan pesaing utamanya sehingga membuat film ini semakin viral. Seperti menurut Vincent Mosco (Hasan, n.d.) bahwa komodifikasi mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari kegunaannya kemudian bertransformasi menjadi komoditi yang bernilai jual pasar.

Dalam perkembangan borjuasi disertai dengan kemajuan politik kelas, Lenin menjelaskan dalam karya besarnya ((Karl Marx Dan Friedrich Engels_ Manifesto Partai Komunis (1848), n.d.) Demokrasi borjuis, pada kenyataannya, selalu menjadi sistem yang hanya menguntungkan kelompok minoritas, kelas atas, dan orang-orang kaya, terutama dalam konteks pemilu dan kehidupan politik sehari-hari. Sebagai contoh, persyaratan verifikasi partai untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu dibahas dalam Dirty Vote. Saking sulitnya persyaratan tersebut, untuk ikut serta dalam pemilu, ternyata diperlukan dana hingga ratusan miliar rupiah. Tak heran jika saat ini hanya orang kaya yang bisa mendirikan partai politik. Semua orang tahu, untuk memenangkan pemilu, seorang calon legislatif

1 harus rela mengeluarkan uang miliaran rupiah. Uanglah yang menentukan demokrasi. Bukan satu orang satu suara, tapi satu rupiah satu suara.

Dirty Vote menunjukkan bagaimana para politisi dapat menghindari undang-undang pemilu dan menyuap pejabat KPU dan Bawaslu. Yang tidak disebutkan secara jelas adalah kekuatan apa yang bisa mereka gunakan untuk melakukan hal tersebut, khususnya kekuatan ekonomi, dengan iming-iming uang dan hak istimewa. Pemungutan suara kotor mengungkap penunjukan pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat sebagai sumber kecurangan pemilu. Pejabat yang diangkat kemudian “membalas” mereka yang telah mempercayakan tugasnya dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya sebagai pejabat negara. Inilah realitas pemerintahan di Indonesia. Semua pejabat dan birokrat berada dalam jaringan “hutang” satu sama lain, sehingga mereka pun saling melindungi keistimewaan masing-masing melalui berbagai praktik KKN.

Kemenangan besar Jokowi dan Prabowo di Sumatera menunjukkan tanda-tanda politik transaksional di kalangan elite politik. Setelah itu, Presiden Jokowi menunjuk 20 pejabat gubernur dan 82 pejabat walikota/bupati, sebuah praktik politik yang melahirkan pembalasan dan loyalitas kepada petahana. Sementara itu, penunjukan Tito Karnavian sebagai pejabat gubernur Papua dinilai mengabaikan aturan yang ada. Dalam hal ini, politik transaksional merupakan taktik politik ala Orde Baru yang saat ini digunakan dengan memberikan tekanan dan intimidasi yang intens kepada pimpinan desa untuk mendukung calon presiden tertentu. Menurut Eriyanto (Eriyanto, 2002), Bingkai mengacu pada skema pemahaman seseorang. Hal ini memungkinkan orang untuk menemukan, mengenali, mengidentifikasi, dan memberi label peristiwa sesuai dengan pemahamannya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin Raka yang unggul dalam beberapa hasil sementara Pilpres 2024 terus bergerilya untuk merangkul lawan politik. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan program lama Jokowi dan kelancaran pelaksanaan program baru Prabowo. Namun, para pengamat berpendapat hal ini bisa mengarah pada pemerintahan gaya Orde Baru dengan “parlemen semu”. Salah satu model frame Analisis framing, teori William A. Gamson, penggabungan media dengan pendapat khalayak. Gamson percaya bahwa wacana media adalah bagian penting dari pemahaman dan pemahaman pendapat umum tentang suatu masalah atau peristiwa (Eriyanto, 2002).

Penelitian ini menggunakan analisis framing. Menurut Sobur (Mahyani Br Hasibuan et al., n.d.) Framing merupakan sebuah pendekatan yang mengeksplorasi perspektif dan perspektif apa yang digunakan jurnalis untuk memilih topik dan membuat berita. Berdasarkan pengertian tersebut, framing merupakan cara jurnalis memberitakan suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kajian analisis framing bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif dan sudut pandang yang digunakan jurnalis ketika memilih topik dan menulis berita. Pada akhirnya,

sudut pandang atau sudut pandang yang menentukan isu mana yang mendapat perhatian, aspek mana yang ditampilkan atau dikecualikan, dan ke mana berita tersebut dibawa. Cara bercerita atau kumpulan gagasan yang diorganisasikan untuk menciptakan struktur makna bagi suatu peristiwa yang berkaitan dengan topik pembahasan disebut bingkai. (Mahyani Br Hasibuan et al., n.d.).

Peneliti akan meneliti bagaimana sebuah film dokumenter yang diangkat dari kisah nyata dan dikemas dalam genre dokumenter oleh sutradara dengan melihat dari teknik framing. Konsep analisis framing yang dijelaskan (Moh. Dey Prayogo, n.d.) framing pada dasarnya adalah cara melihat representasi media terhadap suatu peristiwa, namun bisa juga secara sederhana merupakan suatu analisis tentang bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, dan lain-lain) direpresentasikan oleh media dan mengalami proses konstruksi. Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna-makna tertentu.

Analisis framing tidak hanya berfokus pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada makna di balik pemilihan kata tersebut, termasuk bagaimana beberapa kata ditekankan sementara yang lain diabaikan. Konsep framing, seperti yang dijelaskan oleh Betherson (1995), dipahami sebagai kerangka konseptual atau kumpulan keyakinan yang menyediakan kategori standar untuk menilai realitas. Framing adalah cara memahami bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media, di mana proses ini menyoroti aspek-aspek tertentu dari realitas agar lebih menonjol dan mudah dikenali (Zulhifitri & Hidayat, n.d.). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kerangka kerja William A. Gamson dan Andre Modigliani. Konsep Gamson dipilih karena mampu menghubungkan wacana media dengan opini publik secara efektif.

Framing tak hanya bermain di permukaan. Ia memiliki dampak yang mengakar, memengaruhi cara pandang audiens terhadap realitas. Pemahaman, emosi, dan opini terpengaruh oleh framing, mendorong mereka untuk mendukung atau menentang suatu isu, bahkan mengambil tindakan tertentu. Analisis framing tak terbatas pada berita. Iklan, film, media sosial, semua menjadi objek analisis. Iklan menggunakan framing untuk memanipulasi persepsi konsumen, film menyisipkan pesan ideologi melalui framing, dan media sosial menjadi wadah ekspresi opini yang dibingkai dengan cara tertentu. *Malaysian Journal Of Communication* artinya, analisis framing mengubah pemahaman pembaca terhadap sebuah berita, karena persepsi masyarakat bisa saja berubah setelah mengonsumsi berita dari sebuah perusahaan media. (Fridha et al., 2020)

11

1.2 Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini yaitu pemingkaian yang ada dalam Film Dokumenter “*Dirty Vote*” yang berfokus pada framing kecurangan pemilu 2024 dalam Film “*Dirty Vote*”

9

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh peneliti diatas, masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis *Framing* film dokumenter *Dirty Vote* dengan menggunakan *model William A. Gamson dan Andre Modigliani*?”

8

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk Menganalisis “*Framing* film dokumenter *Dirty Vote* dengan menggunakan *model William A. Gamson dan Andre Modigliani*.”

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan gelar sarjana di bidang keilmuan komunikasi dan kajian komunikasi massa terutama dalam analisis framing pada film. Khususnya dibidang audio visual yakni film yang menjadi media penyampaian pesan kepada khalayak.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami makna dan realitas dikonstruksikan dalam film dokumenter sekaligus menjadi bahan referensi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat yang bisa diterapkan oleh para pembacanya. Untuk penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan kontribusi kepada para pembacanya yaitu meningkatkan kesadaran public

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek

Dokumenter ini menampilkan realitas yang memiliki nilai penting dan mendasar bagi kehidupan, berdasarkan fakta objektif tanpa manipulasi (Rikarno, 2015). Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara Indonesia, Bibitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar, yang berbagi pandangan dan analisis mereka tentang masalah kecurangan pemilu. Film ini akan tersedia di YouTube pada 11 Februari 2024. Film ini dijadwalkan akan ditayangkan pada . Saluran ini disebut Dirty Vote dan durasinya. 1:57:22. Berikut ini pembagian segmen pada film “Dirty Vote”.

Analisa Framing Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter *Dirty Vote* Film dokumenter *Dirty Vote* membahas kecurangan dalam pemilu, terutama fenomena suara kotor, dengan tujuan mengungkap dan menganalisis bagaimana hal tersebut terjadi serta dampaknya terhadap demokrasi. Melalui analisis framing, kita dapat mengidentifikasi cara film ini membentuk persepsi penonton tentang penyebab kecurangan, penilaian moral terhadap dirty vote, solusi yang diusulkan, dan cara bagaimana fenomena ini dipersepsikan sebagai kecurangan terorganisir atau masalah sistemik.

Penyebab kecurangan pemilu, bagi film ini, bisa dijelaskan sebagai hasil kelalaian administratif atau tindakan sengaja dari aktor politik. Penilaian moral dirty vote juga dapat dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi atau masalah teknis yang bisa diselesaikan. Solusi yang diusulkan oleh film ini, apakah reformasi sistem pemilu, penguatan pengawasan, atau penegakan hukum, akan memengaruhi cara penonton melihat upaya untuk memperbaiki sistem. Elemen framing dalam film, seperti penyajian visual, testimoni, penggunaan bahasa, dan konflik politik, akan membentuk persepsi penonton tentang dirty vote. Apakah sebagai kecurangan terorganisir yang direncanakan atau masalah sistemik yang disebabkan oleh kekurangan dalam sistem pemilu. Framing ini akan mempengaruhi bagaimana publik memandang kecurangan pemilu dan kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi.

Dengan pemilihan framing yang tepat, film ini dapat memperkuat kesadaran tentang pentingnya integritas pemilu dan membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Membingkai dirty vote sebagai masalah sistemik atau kecurangan terorganisir dapat membantu penonton memahami solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini serta tindakan yang harus diambil dalam konteks politik yang lebih luas. Analisis framing dalam film dokumenter *Dirty Vote* membantu kita memahami bagaimana kecurangan pemilu dipandang dan dipahami secara luas oleh masyarakat.



Gambar 4.1.1 Poster film dokumenter Dirty Vote

4.1.1 Profil Pemain

1. Dandhy Dwi Laksono

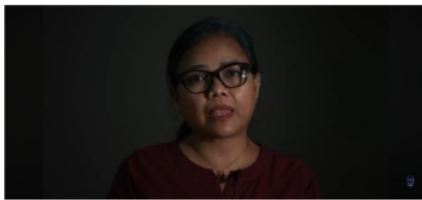


Gambar 4.1 1.1 Dandhy Dwi Laksono

Dandi Dwi Laksono adalah seorang jurnalis Indonesia yang pekerjaan investigasinya meliputi penulisan dan dokumenter. Pria kelahiran 29 Juni 1976 di Lumajang. Pak Dandy memulai karirnya sebagai jurnalis pada tahun 1990. Saya juga berpartisipasi dalam berbagai lokakarya dan seminar jurnalisisme/media di Filipina, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan. Biasa disapa Dandy, ia memulai karirnya sebagai jurnalis pada tahun 1998 di tabloid Kapitar dan majalah Warta Economie. Dia kemudian pindah ke outlet media radio Pass FM, Smart FM dan Ramaco, dan menjadi stringer untuk Radio ABC di Australia. Ia kemudian kembali

terjun ke dunia pertelevisian, menjadi produser berita di Riputan 6 SCTV dan kepala departemen pemberitaan di RCTI. Ia juga mengelola majalah dan website acehita.com sebagai media alternatif pada masa darurat militer di Aceh (2003-2005). Ia dikenal dengan film dokumenternya tahun 2019 "Sexy Killers" yang dirilis menjelang pemilu Indonesia. Dokumen: Kolusi elite politik dengan pertambangan batu bara menyebabkan kerusakan lingkungan. Produksi film dokumenter Dirty Vote. Film dokumenter ini mengupas dugaan adanya kemungkinan kecurangan dalam proses pemilu dan pemilu presiden 2024. Film ini tayang perdana pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB melalui saluran perusahaan produksi WatchDoc di YouTube, bertepatan dengan hari pertama masa hening pemilu.

2. Bivitri Susanti



Gambar 4.1 1.2 Bivitri Susanti

Bivitri tampil dalam film dokumenter "Dirty Vote" dan dikenal sebagai pemerhati dan pakar konstitusi Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999. Ia kemudian menyelesaikan gelar *Master of Laws in Development Education di University of Warwick* di Inggris, lulus pada tahun 2002. Sejak tahun 2015, Bivitri bekerja sebagai dosen hukum tata negara, wakil dekan Fakultas Hukum Gentela, dan peneliti di PSHK (Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Indonesia). Sebagai aktivis reformasi hukum, antikorupsi, dan hak konstitusional, Bibitri kerap berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan berbagai entitas lainnya.

3. Feri Amsari



Gambar 4.1 1.3 Feri Amsari

Membintangi film Dokumenter “*Dirty Vote*” Feri Amsari, SH, MH, LL.M aktif dalam aksi hak asasi manusia. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Sebagai pemerhati Konstitusi, beliau juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia juga aktif menulis topik korupsi, hukum, politik, dan pemerintahan. Saat ini karyanya dimuat di berbagai media cetak antara lain Kompas, Media India, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dll. Beliau juga aktif menulis untuk jurnal-jurnal terkemuka yang terakreditasi dan terindeks Scopus.

Pendidikannya dimulai di Fakultas Hukum Universitas Andara, dimana beliau memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2008. Ia juga memperoleh IPK sarjana yang sangat baik dan menyelesaikan gelar masternya di universitas yang sama. Ia kemudian memperoleh gelar master dalam bidang hukum komparatif Amerika dan Asia dari *William and Mary Law School* di Virginia.

4. Zainal Arifin Mochtar



Gambar 4.1.1.4 Zainal Arifin Mochtar

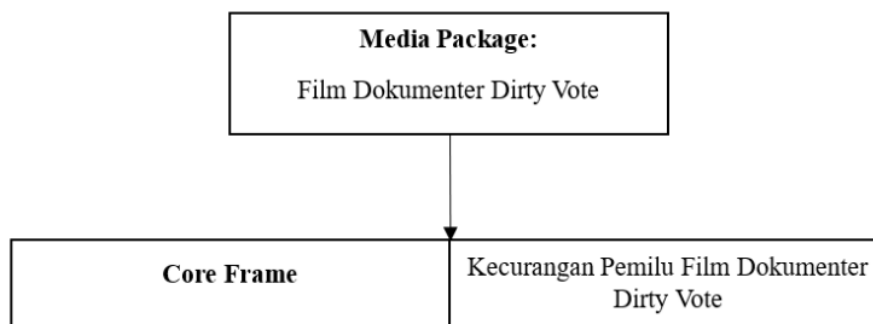
Membintangi film Dokumenter “*Dirty Vote*” Zainal Arifin Mochtar. Makassar, 8 Desember 1978. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Zainal Arifin Mochtar adalah seorang dosen Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2003. Gelar Master of Laws diraihnya dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 2006. Di tahun yang sama, beliau juga memperoleh gelar Doktor Juris. Gelar Juris Doctor dari UGM diperoleh pada tahun 2012.

Sebagai akademisi dan aktivis, Zainal Arifin Mochtar aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi. Sejak 2008, beliau menjabat sebagai Direktur Advokasi Pusat Penelitian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM. Pada 2017, beliau menjadi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Misi Ilegal berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 35 Tahun 2020.

Pengalaman profesionalnya juga mencakup posisi sebagai anggota Komite Audit Otoritas Jasa Keuangan pada 2015, Komisaris PT Pertamina EP dari 2016 hingga 2017, serta anggota Tim Penyelesaian Luar Biasa Pelanggaran HAM pada 2019. Pada tahun 2023, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas untuk periode yang sama.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Dalam proses mengkaji penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah penelitian. Dari ilustrasi kerangka penelitian tersebut fokus kajian dalam penelitian ini adalah framing kecurangan pemilu 2024 dalam Film “*Dirty Vote*”



Film dokumenter ini menampilkan realitas berdasarkan fakta obyektif tanpa menggunakan teknologi dan mengandung nilai penting dan berpengaruh bagi kehidupan (Rikarno, 2015). Film yang dibintangi oleh pakar konstitusi Indonesia, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochutar, berbagi pandangan dan analisisnya mengenai topik kecurangan pemilu.

Film dokumenter *Dirty Vote* merupakan format film bergenre dokumenter dan di rilis pada tanggal 11 Februari 2024 dan telah disaksikan sebanyak 6.437.376 orang. Film ini adalah dokumenter yang mengungkap berbagai bentuk kecurangan sepanjang pemilu dengan menggandeng tiga ahli tata hukum negara. Film dokumenter yang berdurasi 1 jam 57 menit ini dapat menjadi media komunikasi edukasi menjelang pemilu kepada masyarakat agar mampu melihat lebih dalam dan mendapatkan sudut pandang yang lain di samping sekedar memberikan hak suara.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun sehingga mungkin untuk membuat kesimpulan dan tindakan (Subadi, 2006). Sebuah pendekatan yang mengeksplorasi perspektif dan perspektif apa yang digunakan jurnalis untuk memilih topik dan membuat berita. Berdasarkan pengertian tersebut, framing merupakan cara jurnalis memberitakan suatu peristiwa

berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kajian analisis framing bertujuan untuk mengidentifikasi perspektif dan sudut pandang yang digunakan jurnalis ketika memilih topik dan menulis berita. Kecurangan pemilu 2024 Analisis Framing Film Dokumenter "Dirty Vote" Data dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis sehingga bisa diambil kesimpulan. Beberapa kategori yang masuk dalam kecurangan pemilu *dirty vote* dan transparansi dalam sistem politik digambarkan dalam beberapa adegan, seperti merusak kepercayaan masyarakat pada institusi politik, serta bagaimana para politisi dapat menghindari undang-undang pemilu dan menyuap pejabat KPU dan Bawaslu, serta Pemungutan suara kotor mengungkap penunjukan pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat sebagai sumber kecurangan pemilu. Berikut ini penyajian data pada penelitian mengenai kecurangan pemilu 2024 pada film dokumenter *Dirty Vote* pada kanal YouTube *Dirty Vote*.

4.2.1 Film Dokumenter, *Dirty Vote* (2022) Deskripsi Framing Gamson

Hasil dokumentasi dan observasi pada film dokumente *Dirty Vote*. Subjek melakukan tindakan sosial yang dapat dimaknai bahwa menekankan penyampaian *Dirty Vote* adalah pengungkapan Kecurangan Pemilu di Indonesia yang dirangkum menjadi beberapa poin sehingga pesan komunikasi dalam film tersebut dapat tersampaikan kepada penontonnya dengan visualisasi yang baik. Inilah bingkai inti *Core Frame* yang terlihat *Frame Devices* dan *Reasoning Devices* baik secara verbal maupun non-verbal.

4.2.2 Perangkat Framing atau pembingkai (Frame Devices)

Simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam film dokumenter "*Dirty Vote*" mendukung pemikiran sutradara. Simbol-simbol ini menunjukkan peristiwa yang ingin ditampilkan sutradara. Untuk menekankan arti ikon dan membantu khalayak memahaminya, simbol digunakan. Selanjutnya, itu dapat memberikan pemahaman tentang Kecurangan Pemilu



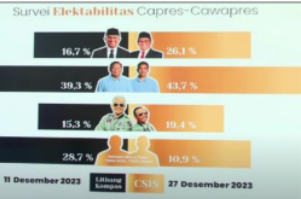
Gambar 4.2.2 Scene Detik 03:49 – 04:00

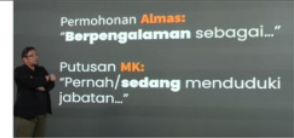
film dokumenter *Dirty Vote*. Di sini, penggunaan framing device lebih menekankan cara melihat masalah.

Perangkat pembingkai ini biasanya digunakan untuk memberi lebel atau gambar tertentu tentang Kecurangan Pemilu yang tersebar. Sutradara sering menggunakan perangkat pembingkai ini untuk beberapa tujuan dalam pencitraan Kecurangan Pemilu film *Dirty Vote*. Beberapa elemen, seperti metaphors, exemplars, catchphrases, depictions, dan visual images, mendukung perangkat pembingkai ini.

No	Scene	Hasil Analisis
1	 <i>Gambar 4.2 1 Scene 1, Detik 00:00 – 1:20</i> “Saya ingin memberikan pesan sederhana kepada mereka yang telah menonton film ini. Pertama-tama, silakan gunakan film ini sebagai panduan.”	Metaphors <i>Pengandaian atau Perumpamaan</i> Simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam film dokumenter “<i>Dirty Vote</i>” mendukung pemikiran sutradara. Simbol-simbol ini menunjukkan peristiwa yang ingin ditampilkan sutradara. Untuk menekankan arti ikon dan membantu khalayak memahaminya, simbol digunakan. Selanjutnya, itu dapat memberikan pemahaman tentang kecurangan pemilu film dokumenter <i>Dirty Vote</i>. Di sini, penggunaan framing device lebih menekankan cara melihat masalah.
2	 <i>Gambar 4.2 2 Scene 2, Detik 2:25 – 2:50</i> “eee... Gibran ini belum, feeling ke politiknya belum, masih senang 100% di dunia usaha, jadi feeling politiknya belum.”	Metaphors <i>Pengandaian atau Perumpamaan</i> Perangkat pembingkai ini biasanya digunakan untuk memberi lebel atau gambar tertentu tentang kecurangan pemilu yang tersebar. Sutradara

	Kelihatannya belum pengen masuk. Kaesang apalagi, masih seneng-senengnya buka sini, buka sini (usaha) [terkekeh]. Yang saya lihat, feeling politik sudah masuk tuh Bobby Pertama, umur. yang kedua, baru dua tahun jadi walikota. yang logis aja lah.”	sering menggunakan perangkat pembingkai ini untuk beberapa tujuan dalam pencitraan.
3	 Gambar 4.2 3 Scene 3. Detik 3:05 – 3:43 “Mohon... doa restu dari seluruh rakyat Indonesia (Saya) Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung dan pengusung kami, dan di sini saya ingin menyampaikan, "Tenang saja Pak, saya sudah di sini."	Metaphors <i>Pengandaian atau Perumpamaan</i> Sutradara sering menggunakan perangkat pembingkai ini untuk beberapa tujuan dalam pencitraan kecurangan pemilu film <i>Dirty Vote</i>. Beberapa elemen, seperti metaphors, exemplars, catchphrases, depictions, dan visual images, mendukung perangkat pembingkai ini
4	 Gambar 4.2 5 Scene 5. Detik 4:00 – 4:05 “Ibu negara Iriana Jokowi mengacungkan dua jari, mengindikasikan keberpihakan pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo-Gibran”	Exemplars <i>Pelengkap untuk menguatkan bingkai</i> Tujuan penggunaan contoh di sini adalah untuk melengkapi bingkai inti dalam kesatuan isi film untuk membenarkan perspektif. Contoh yang ditunjukkan menunjukkan hubungan antara kecurangan pemilu <i>Dirty Vote</i> dalam film ini menggunakan dokumen kekuatan data yang disampaikan.
5	 Gambar 4.2 6 Scene 6. Detik 4:05 – 4:20 “Yang paling penting, presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak.”	Exemplars <i>Pelengkap untuk menguatkan bingkai</i> Adegan penyampaian Jokowi dan Iriana dimana Jika kita simak betapa pentingnya kedua tokoh negara dalam pemenangan Pasangan No urut 2

6	 Gambar 4.2 7 Scene 7. Detik 5:19 – 5:40 “Kembali pertanyaannya soal mengapa satu putaran? Dua putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar.”	Catchphrases <i>Berupa jargon atau slogan</i> Film ini menggambarkan gambaran kecurangan sebagaimana suatu ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Seperti kegagalan tersebut dimulai dengan jargon 1 putaran yang digunakan untuk alat politik demi meraup suara, dan disitu ada anak presiden yang wewenangnya dapat digunakan untuk kepentingan politik.
7	 Gambar 4.2 8 Scene 8. Detik 4:05 – 4:20 “Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang disitu ada anak presiden sedang memimpin, dan itu yang barangkali membuat mereka sangat getol untuk berkata mereka mau satu putaran”	Catchphrases <i>Berupa jargon atau slogan</i> Demi meraup suara, dan disitu ada anak presiden yang wewenangnya dapat digunakan untuk kepentingan politik, pejabat publik yang tidak nertal serta kurangnya kompeten dari BAWASLU dan KPU.
8	 Gambar 4.2 9 Scene 9. Detik 1:21:45 – 1:22:20 “Tapi memang pada hari itu, kami bertiga punya pengalaman yang berbeda-beda. Silakan Mas Uceng, Uda Feri bagaimana pengalaman pada hari itu yang bisa menggambarkan semua, sebelas tadi yang saya jelaskan sehingga sebenarnya sebuah media massa nasional bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi.”	Depictions <i>Label yang digunakan dalam sebuah isu</i> Penggunaan <i>Depiction</i>, pada Dalam film dokumenter <i>Dirty Vote</i>, media massa nasional menyebut Gibran sebagai "anak haram konstitusi" (1:22:18). Citra yang terbentuk tentang Gibran muncul melalui berbagai hal kontroversial yang terkait dengan dirinya. Dalam dokumenter ini, Gibran digambarkan sebagai puncak dari kecurangan Pemilu 2024, terkait dengan perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan

		hanya untuk memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. .
9	 Gambar 4.2 10 Scene 10. Detik 10:45 – 11:22 “Pulau Jawa dikenal sebagai wilayah dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 115 juta suara pemilih. Namun, secara geografis, sebarannya terbatas hanya pada 6 provinsi. Sebaliknya, Pulau Sumatera memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan sebaran wilayah, dengan 10 provinsi yang memberikan kontribusi besar. Hal ini tercermin pada Pemilu 2014, di mana Joko Widodo berhasil memenangkan suara di 7 provinsi, sementara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa hanya unggul di 3 provinsi..”	Visual Image <i>Perangkat pendukung berupa gambar atau citra untuk menekankan pesan</i> Adekan penyampaian data dimana Jika kita melihat betapa pentingnya distribusi wilayah dibandingkan dengan distribusi suara. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak penduduknya. Ada 115 juta pemilih. Dilihat dari data sebarannya, hanya ada enam negara bagian. Bandingkan dengan apa yang Anda lihat di Sumatra. Pulau Sumatra merupakan pulau penentu sebaran wilayah dan mempunyai 10 provinsi yang menjadi penentu sebaran wilayah. Mari kita lihat latar belakang pemilu lalu. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan tujuh negara bagian, sedangkan Prabowo dan Hatta Rajasa hanya memenangkan tiga negara bagian.
10	 Gambar 4.2 11 Scene 11. Detik 1:39:15 – 1:39:50 “Tapi saya kan masih tidur itu ya. jadi, tiba-tiba dibangunin oleh senior, dikatakan Gibran diizinkan mencalonkan diri, yang membuat saya sempat merasa marah hingga terpikir untuk menggugat keputusan tersebut. Hal ini mengguncang impian saya tentang keindahan demokrasi di Indonesia. Namun kini, setelah merenung, rasanya demokrasi di negeri ini tampak begitu mengecewakan..”	Roots <i>Analisis kausal atau sebab akibat</i> Penggunaan <i>Roots</i> pada menit 1:39:27 – 1:39:42 ditemui dialog yang menyatakan “Gibran diperbolehkan mencalonkan diri, namun hal ini membuat saya merasa kecewa hingga terpikir untuk menggugat, karena impian saya tentang keindahan demokrasi di

		Indonesia seakan hancur. Kini, saya tersadar bahwa demokrasi kita telah mengalami keruntuhan. Kekecewaan ini mencerminkan rasa pengkhianatan masyarakat terhadap realitas demokrasi Indonesia yang jauh dari harapan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Saat ini, pemerintahan sedang berada dalam kondisi yang sulit.
11	 <i>Gambar 4.2 11 Scene 11. Detik 1:53:35 – 1:54:08</i> “Semua rencana ini tidak muncul begitu saja atau dirancang sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memanipulasi pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang telah berkuasa bersama selama 10 tahun terakhir.”	Appeal to Principle <i>Merupakan pemikiran, perinsip, dan klaim moral</i> Kami peduli terhadap masyarakat untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan sukses dengan “menutup mata” terhadap bukti-bukti kecurangan yang dapat merusak pemilu, bagian terpenting dari demokrasi. Sebab, ketertarikan masyarakat terhadap isu ini akan menentukan munculnya pemimpin baru yang terbaik bagi negeri ini.
12	<i>Sistem pemilu yang ada saat ini membuka peluang bagi para caleg untuk menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Sistem pemilu legislatif di Indonesia menggunakan model proporsional terbuka, di mana seorang caleg dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam daftar terbuka partainya. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang diterapkan sebelum Pemilu 2004, di mana keputusan siapa yang terpilih sepenuhnya berada di tangan partai politik. Sistem terbuka ini mendorong para caleg bersaing secara intens untuk mengumpulkan suara</i>	Consequences <i>Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai</i> <i>Menggambarkan kecurangan sebagai hal yang “luar biasa” dan “tidak dianggap baik” dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu/demokrasi yang sedang berlangsung, dan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu/demokrasi yang sedang berlangsung. Hal ini dapat</i>



Gambar 4.2 1 Gambar Efek
Consequence

sebanyak mungkin. Akibatnya, persaingan di dalam partai menjadi sangat sengit dan penuh tekanan.

menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan, serta dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. dalam proses pemilu. Menggambarkan tindakan curang yang dilakukan politisi sebagai "mempermainkan pemilih" atau "mengambil kepentingan pemilih" berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi dan institusi politik. Dan menggambarkan penipuan sebagai sesuatu yang "tidak boleh diabaikan" dapat mengarah pada tindakan publik seperti protes, demonstrasi, dan penegakan hukum.

Kerangka inti (core frames) mencakup elemen-elemen utama yang membantu memahami suatu peristiwa dengan jelas serta memberikan arah dalam memahami topik. Kerangka ini terbentuk dari simbol-simbol yang dipadatkan (condensing symbols), yakni hasil interaksi antara perangkat simbolik seperti perangkat pembingkai (framing devices) dan perangkat penalaran (reasoning devices), yang menjadi dasar penerapan perspektif tertentu. Simbol-simbol dalam sebuah wacana terlihat transparan ketika mengandung elemen bermakna yang berfungsi sebagai panduan untuk merepresentasikan sesuatu. Simbol-simbol yang dipadatkan memiliki makna konotatif, yaitu makna yang terhubung langsung dengan simbol itu sendiri, tanpa mengacu pada hal lain.

Tabel Hasil Analisis *Framing* film “Dirty Vote”

Perangkat Pembingkaihan (<i>Framing Devices</i>)	Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)
Film dokumenter berfungsi menyajikan konteks dan isu tertentu. Dalam kasus film <i>Dirty Vote</i> , kecurangan menjelang Pemilu 2024 diungkap sebagai strategi yang terencana dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan proses demokrasi.	Film dokumenter menyajikan elemen-elemen yang membantu penonton memahami dan menyelami konteks serta topik yang dibahas. Dalam konteks kecurangan menjelang Pemilu 2024, <i>Dirty Vote</i> menggambarkan kecurangan sebagai tindakan tidak etis yang harus ditolak, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komponen Perangkat Pembingkaihan (<i>Framing Devices</i>)	Komponen Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)
<i>Metaphor</i> , Artinya asumsi atau dugaan. Film “Dirty Vote” membandingkan kecurangan pemilu dengan catur, dan kecurangan adalah pembentukan strategi yang terorganisir. Strategi yang ditetapkan akan berhasil jika pihak berwenang dilibatkan.	<i>Roots</i> , Dengan kata lain, ini adalah analisis kausal sebab dan akibat. Dalam film "Dirty Vote", kecurangan menjelang pemilu 2024 merusak keindahan demokrasi dan menyebabkan kekecewaan masyarakat serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.
<i>Exemplars</i> , Hal ini akan dijelaskan dengan menghubungkan kerangka kerja dan contoh spesifik. Contoh ini bisa berupa perbandingan untuk memperdalam dan memperkuat cara pandang terhadap topik yang disampaikan. Dalam film Dirty Vote, kecurangan digambarkan sebagai sesuatu yang tidak mengikuti aturan yang ada dengan cara mengubah atau memanipulasinya. Dengan melakukan perbandingan terhadap	<i>Consequences</i> , yaitu hasil yang dihasilkan dari rumusan masalah. Film Dirty Vote menggambarkan kecurangan yang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan menjelang perayaan pemilu, yang dapat berujung pada tindakan publik seperti protes, demonstrasi, dan penegakan hukum..

suatu aturan yang seharusnya diterapkan dengan kenyataan yang ada.	
<i>Catchphrases</i>, Dengan kata lain, ekspresi yang menarik perhatian, menciptakan kontras, dan menonjol melalui percakapan. Biasanya digunakan dalam bentuk slogan atau jargon. Film "Dirty Vote" mencakup "Pemilu kami tidak berjalan dengan baik" dan "Tidak diperlukan kecerdasan atau kecerdasan untuk mempersiapkan dan melaksanakan skenario kotor ini. Dibutuhkan spiritualitas dan rasa malu yang tercerahkan." Ada beberapa slogan seperti "Kami membutuhkan dua di antaranya." Kedua ungkapan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan salah yang dilakukan merupakan tindakan asusila yang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. "	<i>Appeal to Principle</i>, yaitu klaim moral yang dapat diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pesan yang disampaikan dalam film "Suara Kotor" adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus memperhatikan dan berhati-hati dalam menjalankan proses menuju pemilu, dan tidak ada bukti adanya penyimpangan yang merugikan mampu mengidentifikasi Kesadaran yang cermat akan tatanan proses demokrasi. Semoga proses demokrasi ini berjalan sukses, dan semoga muncul pemimpin terbaik bagi negeri ini.
<i>Depiction</i>, artinya, menyajikan suatu topik dengan menggunakan kata, frasa, atau istilah yang mempunyai makna konotatif. Dalam film Dirty Vote, kecurangan pemilu digambarkan sebagai sistem politik yang curang, melanggar hukum, dan lemah. Terlebih lagi, kecurangan merupakan tindakan yang menghambat terciptanya pemimpin.	
<i>Visual Image</i>, Artinya, penggunaan gambar, foto, tabel, atau visualisasi lainnya untuk menjelaskan atau mengilustrasikan fakta dengan lebih jelas. Film "Dirty Vote" memiliki beberapa gambar, foto, dan tabel.	

BAB V

Kesimpulan

KESIMPULAN

Film dokumenter *Dirty Vote* mengungkapkan adanya dugaan kecurangan besar-besaran dalam Pemilu Parlemen Indonesia tahun 2024. Melalui pandangan tiga pakar hukum terkemuka, film ini memperlihatkan berbagai metode manipulasi yang dilakukan. Kecurangan tersebut didasari oleh perilaku tidak etis para pejabat publik, penyalahgunaan dana negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, serta kelemahan lembaga penyelenggara seperti KPU dan BAWASLU dalam menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. Rencana kecurangan ini bahkan mencakup strategi sistematis yang disebut sebagai "pengadilan sebagai kedok atau rencana induk."

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

2 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	revolutioner.org Internet Source	1 %
2	journal.ipmafa.ac.id Internet Source	1 %
3	cakheppy.wordpress.com Internet Source	<1 %
4	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
5	www.detik.com Internet Source	<1 %
6	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %

10	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.bolatimes.com Internet Source	<1 %
14	banjani.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
16	docplayer.info Internet Source	<1 %
17	Angelica Nathaniella, Irwan Triadi. "Pengaruh Film Dokumenter "Dirty Vote" pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	<1 %
18	jalantikus.com Internet Source	<1 %
19	m.jpnn.com Internet Source	<1 %

20

www.arlojiwanita.com

Internet Source

<1 %

21

Aldi Ferdiansyah, Na'imah, Syaiful Kiram, Yogi Sopian Haris, Muhammad Syarqowi.

"Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

<1 %

22

priangan.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

23

ummaspul.e-journal.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20